

EVALUATING PROGRAM OF CURRICULUM DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION AT SCHOOL

Kunandar

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), DKI Jakarta
Jl. Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
nandarkun@yahoo.com

Abstract

The purpose of this research is to measure the worth of the development and implementation of KTSP at SMPN 285 Pulau Untung Jawa in Administrative Regency of Kepulauan Seribu Province of DKI Jakarta. This evaluation research applied the CIPPO model evaluation which meant Context, Input, Process, Product, and Outcome. The result was categorized into three, i.e. high criteria, moderate criteria, and low criteria. The result also showed that (1) there were two aspects which had moderate level of actuality and one aspect with low actuality in sub evaluation of context, (2) there were sic aspects which had low level of actuality and two aspects with moderate level of actuality in sub evaluation of input, and (3) all aspects had low level of actuality in sub evaluation process, (4) all aspects had moderate level of actuality in sub evaluation of product, and (5) there were two aspects which had high level of actuality and one aspect with low level of actuality in sub evaluation of effect. The result of this study showed that the development and implementatio of KTSP in SMPN 285 Pulau untung Jawa at Kepulauan Seribu of DKI Jakarta Province was not optimal yet.

Keywords: curriculum, CIPPO Model, program evaluation

EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Kunandar

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), DKI Jakarta
Jl. Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan
nandarkun@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program mengenai pengembangan dan implementasi KTSP di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan model evaluasi *CIPPO*, yaitu *Contex, Input, Proses Product dan Outcome*. Hasil dikelompokkan dengan kriteria tinggi, sedang dan rendah menunjukkan bahwa: ada dua aspek memiliki tingkat aktualisasi sedang dan satu aspek memiliki tingkat aktualisasi tinggi pada sub evaluasi konteks; ada enam aspek memiliki tingkat aktualisasi rendah dan dua aspek memiliki tingkat aktualisasi tinggi, pada sub evaluasi input; semua aspek memiliki tingkat aktualisasi rendah pada sub evaluasi proses; semua aspek memiliki tingkat aktualisasi sedang pada sub evaluasi produk; dan ada dua aspek memiliki aktualisasi tinggi serta satu aspek memiliki tingkat aktualisasi rendah dan pada sub evaluasi dampak. Hasil penelitian menyimpulkan pengembangan dan implementasi KTSP di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta belum optimal.

Kata kunci: kurikulum, KTSP, model CIPPO, evaluasi program

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional tertuang dalam kurikulum yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum yang dikembangkan harus bersifat dinamis dan terus diperbaharui seiring dengan realitas, perubahan, dan tantangan dunia pendidikan dalam membekali peserta didik menjadi manusia yang siap hidup dalam berbagai keadaan (Nurhadi, 2003: 21) sehingga mampu menggali potensi anak didik. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan adalah dengan pembenahan kurikulum. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menuntut siswa untuk memberikan kemampuan dan keterampilan dasar minimal (*minimum basic skill*), menerapkan konsep belajar tuntas (*mastery learning*), dan membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis, dan mandiri bagi peserta didik pengembangan dan implementasi KTSP sebagai kebijakan perlu dipantau dan mendapatkan perhatian dari semua pihak. Terdapat indikasi pengembangan dan implementasi KTSP di lapangan kurang berjalan sebagaimana mestinya, penyebabnya adalah kesiapan guru, sarana prasarana, manajemen sekolah dan beberapa kendala lainnya. Hal tersebut mempengaruhi optimalisasi pengembangan dan implementasi KTSP di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI

Jakarta. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu studi mendalam yang mampu memantau pengembangan dan implementasi KTSP secara menyeluruh. Studi tersebut dilakukan melalui penelitian evaluasi program yang memfokuskan pada bagaimanakah pengembangan dan implementasi KTSP di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.

Evaluasi merupakan suatu proses sistematis pengumpulan dan analisis informasi mutu (Stufflebeam dan Shinkfield, 2007: 7), untuk membuat sebuah keputusan (Gronlund, 1990: 34), sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu kegiatan untuk melihat umpan balik dan perbaikan berkelanjutan (Isaac dan Michael, 1983: 84). Evaluasi diselenggarakan dengan maksud untuk pencerahan, akuntabilitas, program perbaikan, program klarifikasi, program pengembangan, dan alasan simbolik.

Evaluasi kurikulum terkait dengan pengembangan dan implementasi KTSP di lapangan. Dengan melakukan evaluasi akan diketahui sejauh mana ketercapaian pengembangan dan implementasi kurikulum sehingga dapat diperoleh sebuah kebijakan/keputusan mengenai program tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Patton (1986: 37) bahwa pengambilan keputusan dapat menggunakan informasi pengembangan dan implementasi untuk meyakinkan bahwa suatu kebijakan jadi dipakai dalam pelaksanaan sesuai dengan rencana, atau menguji kemungkinan terjadinya kebijakan.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPPO yang merupakan penyempurnaan oleh seorang ahli evaluasi dari *University of Washington* yang bernama Sax pada tahun 1980 dari model evaluasi CIPP yang dikembangkan pertama kali oleh Stufflebeam pada tahun 1967 di *Ohio State University*. CIPPO merupakan singkatan *konteks, input, process, product* dan *outcome*. Model CIPPO adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem (Arikunto, 2004: 39).

Stufflebeam dan Shinkfield (2007: 326) membuat pedoman kerja untuk melayani para manajer dan administrator menghadapi empat macam keputusan pendidikan, sehingga membagi evaluasi menjadi empat macam, yaitu: *pertama*, evaluasi konteks, membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program. *Kedua*, evaluasi input, membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. *Ketiga*, evaluasi proses, dilakukan untuk membantu mengimplementasikan keputusan. Sampai sejauhmana rencana telah diterapkan? Apa yang harus direvisi? *Keempat*, evaluasi produk, untuk membantu keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah program berjalan?

Menurut Stake (2007: 408), pada tahap *outcome*, yakni pada akhir program dipergunakan untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai akibat program yang telah dilakukan, yaitu perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah program itu selesai. Widoyoko (2009: 28) mengatakan bahwa *outcome*

program tidak kalah pentingnya dengan *output*, karena dalam *outcome* ini akan dinilai seberapa jauh peserta didik mampu mengimplementasikan kompetensi yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia nyata (*real world*) dalam memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan dalam masyarakat. Lebih lanjut Widoyoko menjelaskan bahwa *outcome* peserta didik akan mempunyai prestasi sosial (*social achievement*) dalam masyarakat, mampu mengatasi berbagai macam permasalahan maupun tantangan hidup, mampu melihat dan mengambil peluang yang ada dalam lingkungan hidupnya yang pada akhirnya peserta didik diharapkan eksis dan sukses dalam hidup bermasyarakat baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Prestasi sosial peserta didik dalam masyarakat merupakan hasil pembelajaran yang bersifat jangka panjang atau *outcome*. Dalam melakukan evaluasi program tidak cukup jika hanya terbatas pada hasil jangka pendek (*output*), tetapi sebaiknya juga menjangkau hasil jangka panjang (*outcome*).

Dalam konteks pembaharuan kurikulum pemerintah meluncurkan KTSP yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ada beberapa alasan mengapa KTSP menjadi pilihan dalam upaya perbaikan kondisi pendidikan di tanah air, antara lain: (1) potensi siswa itu berbeda-beda dan potensi tersebut akan berkembang jika stimulusnya tepat, (2) mutu hasil pendidikan yang masih rendah serta mengabaikan aspek-aspek moral, akhlak, budi pekerti, seni dan olah raga, serta *life skill*, (3) persaingan global sehingga menyebabkan siswa yang mampu akan berhasil dan yang kurang mampu akan gagal, (4) persaingan pada kemampuan SDM produk lembaga pendidikan, serta (5) persaingan terjadi pada lembaga pendidikan, sehingga perlu rumusan yang jelas mengenai standar kompetensi lulusan, yang selanjutnya standar kompetensi mata pelajaran perlu dijabarkan menjadi sejumlah kompetensi dasar (Kunandar, 2007: 121-122).

KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan/kantor Depag Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan/kantor Depag untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus (Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi). Implementasi kurikulum adalah operasionalisasi konsep kurikulum yang masih bersifat potensial (tertulis) menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Dalam pandangan Mulyasa (2009: 94) implementasi kurikulum adalah hasil terjemahan guru terhadap kurikulum sebagai rencana tertulis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan model evaluasi *CIPPO*, yaitu *Context, Input, Process, Product* dan *Outcome*. Lima unsur model evaluasi tersebut digunakan untuk mengetahui pengembangan dan implementasi KTSP. Pengumpulan data

dilakukan dengan; (1) wawancara terbuka dan mendalam, (2) observasi, (3) studi dokumen, (4) angket dan (5) *Focus Group Discussion* (FGD)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Konteks

Dinas Pendidikan Kabupaten maupun provinsi sangat minim melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan implementasi KTSP kepada kepala sekolah dan guru. Dinas pendidikan provinsi dan suku dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta maupun pengawas sekolah belum secara rutin melakukan pembinaan terhadap pengembangan dan implementasi KTSP. Hal yang menyebabkan kurangnya pengawasan adalah kurang jumlah pengawas yang minim. Pengawas yang bertugas selama ini membina SMP adalah pengawas dari Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara yang berjumlah satu orang. Kondisi inilah yang membuat pembinaan pengawas kepada SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu kurang optimal.

Alasan lain kurang optimalnya implementasi KTSP adalah (1) ada yang beranggapan bahwa KTSP sama saja dengan kurikulum sebelumnya, yakni masih mementingkan dan menonjolkan dimensi pengetahuan (teoritis), sedangkan aspek afektif dan psikomotorik masih kurang diperhatikan, (2) pengembangan KTSP membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dimana pihak sekolah tidak bisa menyediakannya dengan maksimal, (3) pengembangan dan implementasi KTSP membutuhkan dukungan dana yang cukup tinggi, sehingga ada kekhawatiran akan menjadi beban orang tua peserta didik, dan (4) dalam KTSP membutuhkan rombongan belajar yang lebih kecil (maksimal 32 per rombongan belajar) sementara pihak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhinya persyaratan dan mengimplementasikan KTSP.

Evaluasi Masukan (*Input*)

Rekrutmen peserta didik tidak melalui seleksi berdasarkan nilai general *test* (tahun pelajaran 2006/2007 dan 2007/2008) atau nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) mulai tahun pelajaran 2008/2009. Hal ini dikarenakan input peserta didik baru tersebut hanya berasal dari satu sekolah yaitu SDN 01 Pagi Pulau Untung Jawa maka seluruh calon peserta didik baru yang mendaftar di SMPN Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu seluruhnya diterima.

Masalah lainnya rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan orangtua serta kurangnya sarana prasarana. Orangtua siswa sebagian bekerja sebagai buruh nelayan dan ibu sebagai ibu rumah dengan pendapatan keluarga dibawah lima ratus ribu rupiah per bulan. Sarana prasarana belajar untuk menunjang program KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada 16 jenis sarana prasarana belajar dinilai ada dalam keadaan baik, 7 jenis dalam keadaan cukup

baik, 2 jenis dalam keadaan kurang baik dan 4 jenis saran yang tidak tersedia, yaitu ruang wakil kepala sekolah, UKS, BK dan ruang OSIS.

Dari segi kelengkapan dokumen perangkat kurikulum, sekolah telah memiliki dokumen yang diperlukan namun dokumen tersebut hanya berada atau dipegang oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sementara guru-guru tidak memiliki dokumen perangkat kurikulum yang lengkap, baik dalam bentuk *print out* maupun *soft copy*. Dapat disimpulkan dari segi kelengkapan perangkat kurikulum masih dalam kategori rendah. Seharusnya dokumen perangkat kurikulum harus terdistribusi kepada seluruh guru agar guru dapat memahami dan mencermati dokumen perangkat kurikulum tersebut dengan baik.

Untuk mengatasi masalah pembiayaan program wajib belajar sembilan tahun pihak sekolah mengoptimalkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari pemerintah daerah. Melalui sumber dana tersebut, pihak sekolah membebaskan biaya sekolah bagi peserta didik. Namun keadaan ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sekolah gratis. Hal ini mengakibatkan pihak sekolah memerlukan biaya untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan agar lebih baik dan harus meminta kontribusi kepada orang tua peserta didik namun karena persepsi sekolah gratis maka sebagian besar orangtua menolak untuk dipungut biaya. Dengan keadaan ini maka sekolah hanya mengandalkan dana BOS dan BOP yang jumlahnya sangat minim. Dari keadaan ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan program pengembangan dan implementasi KTSP belum mencukupi memadai.

Evaluasi Proses

Dalam pengembangan dan implementasi KTSP evaluasi proses lebih difokuskan pada kegiatan: (1) penyusunan dan pengembangan KTSP oleh pihak sekolah (dokumen satu dan dua KTSP), (2) implementasi kegiatan belajar mengajar, (3) implementasi proses penilaian hasil belajar peserta didik, dan (4) implementasi pengembangan diri (kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling) di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. KTSP dokumen satu belum secara optimal dikembangkan dan diimplementasikan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator: *Pertama*, dokumen satu KTSP tidak dikembangkan sepenuhnya oleh SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu setiap tahun pelajaran baru. *Kedua*, penyusunan dokumen satu KTSP belum mengacu kepada panduan KTSP yang dikembangkan oleh BSNP. *Ketiga*, penyusunan KTSP belum melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, yaitu pembentukan tim penyusun KTSP, penyiapan dan penyusunan draft, review dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. *Keempat*, penyusunan KTSP belum melibatkan komite sekolah. *Kelima*, proses penyusunan dan pengembangan dokumen KTSP belum di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. *Keenam*, sekolah belum memanfaatkan empat jam tambahan untuk menambah jam pembelajaran pada mata pelajaran

tertentu. *Ketujuh*, dokumen KTSP belum disupervisi oleh dinas pendidikan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

KTSP dokumen dua, yakni silabus belum disusun dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007). Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa hal tersebut di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemahaman konsep penyusunan silabus dari sebagian besar guru masih kurang. *Kedua*, sekolah belum mengembangkan silabus secara mandiri, tetapi masih mengadopsi dari silabus sekolah lain. *Ketiga*, Kualitas silabus yang disusun oleh guru belum optimal. KTSP dokumen dua berikutnya yakni Rencana Program Pembelajaran (RPP) belum disusun dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007). Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah: *Pertama*, pemahaman konsep penyusunan RPP dari sebagian besar guru masih kurang. *Kedua*, guru belum mengembangkan RPP secara mandiri. *Ketiga*, Kualitas RPP yang disusun oleh guru belum optimal. *Keempat*, RPP yang disusun guru sebagian besar belum mencerminkan kegiatan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).

Pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran berkaitan dengan aspek pengelolaan kelas belum sepenuhnya mengacu kepada standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007). Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut. *Pertama*, sebagian besar guru belum melakukan pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan aktivitas pembelajaran, misalnya aktivitas diskusi kelas, tempat duduk siswa belum diseting sesuai karakter pembelajaran diskusi sehingga kegiatan pembelajaran kurang optimal. *Kedua*, sebagian besar guru belum menyesuaikan materi dengan kecepatan dan kemampuan peserta didik. *Ketiga*, sebagian besar guru belum menciptakan ketertiban dalam pembelajaran. *Keempat*, sebagian besar guru belum memberikan penguatan selama proses pembelajaran. *Kelima*, sebagian besar guru belum memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu.

Dari segi kompetensi kepribadian seluruh guru sudah memenuhi indikator, aspek volume dan intonasi suara, tutur kata santun dan dapat dimengerti peserta didik, menghargai pendapat peserta didik dan memakai pakaian yang sopan, bersih dan rapi sebagian besar guru sudah memenuhi ketentuan tersebut. Sementara itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk aspek pelaksanaan pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mengacu kepada standar proses (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007). Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah: *Pertama*, sebagian besar guru belum menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. *Kedua*, sebagian besar guru belum mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. *Ketiga*, sebagian besar guru belum menyampaikan cakupan materi dan

penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. *Keempat*, sebagian besar guru belum melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, terutama pada aspek metode, teknik penilaian, dan sumber belajar. *Kelima*, sebagian besar guru belum melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik materi yang akan dipelajari. *Keenam*, sebagian besar guru belum menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. *Ketujuh*, sebagian besar guru belum memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kontekstual. *Kedelapan*, sebagian besar guru belum memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar. *Kesembilan*, sebagian besar guru belum memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar bermakna dan bermutu. *Kesepuluh*, sebagian besar guru belum bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan pelajaran. *Kesebelas*, guru belum melakukan *posttes*, memberikan tugas, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik meliputi: (1) penilaian hasil belajar, (2) analisis hasil belajar peserta didik, dan (3) melaksanakan program tindak lanjut (remedial dan pengayaan). Pelaksanaan penilaian hasil belajar peserta didik belum sepenuhnya mengacu kepada standar penilaian (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007). Beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah: *Pertama*, pemahaman guru terhadap prinsip-prinsip penilaian masih rendah. *Kedua*, pemahaman guru terhadap teknik-teknik penilaian masih rendah. *Ketiga*, sebagian besar guru belum menetapkan KKM sesuai dengan prosedur. *Keempat*, butir soal yang disusun guru belum menentukan taksonomi (C1 sampai dengan C6). *Kelima*, sebagian besar guru belum melakukan analisis terhadap hasil penilaian peserta didik, seperti tingkat kesukaran soal dan daya beda soal.

Dalam pengembangan dan implementasi KTSP pengembangan diri meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling (BK). Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat peserta didik, dan kondisi sekolah. Dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bimbingan konseling (kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, dan karir), dan kegiatan ekstrakurikuler, seperti: kepramukaan, PMR, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga, kesenian, dan kegiatan sejenis lainnya.

Hasil observasi dan FGD menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan diri belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah belum mampu menyediakan kegiatan yang bervariasi yang dapat mengakomodasi potensi, bakat, dan minat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada jumlahnya sangat terbatas, yakni pramuka, rohis, kesenian, dan sepak bola. Sekolah juga belum bisa memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi sekolah yang berada di pantai dengan kegiatan yang bernuansa kebaharian.

Kegiatan bimbingan konseling (BK) juga belum berjalan sebagaimana seharusnya. Ada beberapa kendala yang menyebabkan kegiatan BK belum berjalan dengan baik. *Pertama*, sekolah belum memfasilitasi ruang BK yang khusus dan layak untuk melakukan kegiatan BK. *Kedua*, sekolah belum memiliki guru yang khusus menangani BK dengan latar belakang BK, sehingga selama ini yang menangani BK adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas.

Evaluasi Produk (*Product*)

Evaluasi produk meliputi evaluasi hasil Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US). Rata-rata nilai UN 6,69 dari standar 8,0 dan nilai US 6,11 dari nilai standar 8,0. Dari keadaan ini dapat dikatakan bahwa aktualisasi produk termasuk pada kategori sedang.

Evaluasi Dampak (*Outcome*)

Kemampuan *life skill* peserta didik dilihat melalui muatan lokal keterampilan industri kecil (KIK). Muatan lokal KIK merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi peserta didik yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah yakni kerajinan tangan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar laut sesuai dengan lokasi sekolah ini berada di daerah pantai. Hasil dari muatan lokal KIK peserta didik berupa benda-benda seperti lampu gantung, perahu, hiasan dan lainnya yang terbuat dari karang dan benda-benda lainnya yang ada di sekitar sekolah dan tempat tinggal peserta didik sudah dijual sebagai cinderamata kepada wisatawan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Dampak

Standar Objektif	Kondisi Faktual	Aktualisasi			Keputusan
		R	S	T	
Serapan ke SMA/SMK/ MA negeri minimal 70%	Tingkat keberhasilan peserta didik diterima di SMA/SMK/MA negeri sebesar 11,43%		√		Berdasarkan sub evaluasi dampak diperoleh satu aspek berada pada tingkat aktualisasi rendah, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan lebih lanjut.
Pelaksanaan <i>life skill</i> memadai	Pelaksanaan <i>lifeskill</i> sangat memadai dengan adanya hasil karya peserta didik melalui muatan lokal kerajinan industri kecil			√	Sedangkan dua aspek lainnya berada pada tingkat aktualisasi tinggi.
Prestasi non akademik mencapai juara tingkat kabupaten	Tingkat pencapaian prestasi non akademik mencapai tingkat kabupaten dan provinsi			√	

Keterangan:

R = Rendah, S = Sedang, dan T = Tinggi

Selain prestasi akademik sekolah memiliki prestasi non akademik. Prestasi non akademik yang diperoleh juara lomba dayung, lomba baca puisi, lomba seni kriya dan lomba baca tulis Al-Quran. Hasil evaluasi dampak dalam penelitian ini mempunyai aktualisasi dalam kategori tinggi. Hasil analisis deskriptif evaluasi dampak disajikan pada tabel 1.

SIMPULAN

Pertama, hasil evaluasi konteks yang meliputi tiga aspek, yakni: (1) tujuan, landasan hukum dan pembinaan, (2) analisis kebutuhan, dan (3) studi kelayakan program pengembangan dan implementasi KTSP, dua aspek berada pada kategori sedang dan satu aspek berada pada kategori tinggi. Aspek yang berkategori sedang adalah tujuan, landasan hukum dan pembinaan serta studi kelayakan penyelenggaraan program pengembangan dan implementasi KTSP. Sedangkan aspek yang berkategori tinggi adalah analisis kebutuhan.

Kedua, hasil evaluasi input terdiri atas delapan aspek, yakni: (1) rekrutmen peserta didik baru, (2) persyaratan administrasi guru, (3) tenaga kependidikan, (4) jumlah rombongan belajar, (5) Kondisi sosial ekonomi orang tua, (6) sarana dan prasarana, (7) perangkat kelengkapan kurikulum, dan (8) pembiayaan. Dari delapan aspek ini, enam aspek dengan kategori rendah dan dua aspek kategori sedang. Aspek yang berkategori rendah adalah persyaratan administrasi guru, tenaga kependidikan, kondisi sosial ekonomi orang tua peserta didik, sarana prasarana, perangkat kelengkapan kurikulum, dan pembiayaan. Sedangkan aspek yang berkategori sedang adalah rekrutmen peserta didik dan jumlah rombongan belajar.

Ketiga, hasil evaluasi proses terdiri atas empat aspek, yakni: (1) penyusunan dan pengembangan KTSP oleh pihak sekolah, (2) implementasi kegiatan belajar mengajar, (3) implementasi proses penilaian hasil belajar peserta didik, dan (4) implementasi pengembangan diri (kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling). Keseluruhan aspek berada pada kategori rendah.

Keempat, hasil evaluasi produk terdiri atas dua aspek, yakni hasil Ujian Nasional (UN) dan hasil Ujian Sekolah (US). Kedua aspek ini berada pada kategori sedang.

Kelima, hasil evaluasi *outcome* terdiri dari tiga. Dari ketiga aspek ini, dua aspek dalam kategori tinggi (kemampuan *life skill* dan prestasi non akademik) dan satu aspek dalam kategori rendah (serapan ke SMA/SMK/MA negeri).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan dan implementasi KTSP di SMPN 285 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safrudin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gronlund, Norman dan Robert L. Linn. (1990). *Measurement and Evaluation in Teaching*. New York: Macmillan Publishing Company.
- Isaac, Stephen dan William B. Micheal. (1983). *Handbook in Research and Evaluation for Education an Behaviorial Sciences*. California: ediT's Publisher.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyasa, E. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhadi. (2003). *Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Patton, Michael Quinn. (1986). *Qualitative Evaluation Methods*. London: Sage Publications. Inc.
- Stufflebeam, Daniel L., dan Anthony J. Shinkfield. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Stake, E. Robert. (2004). *Standar-Based & Responsive Evaluation*. California: Sage Publication Inc.
- Widoyoko, S. Eko Putro. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.